

Judul : Satgas akan usut transaksi janggal
Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat.

Satgas akan Usut Transaksi Janggal

FAUSTINUS NUA

faustinus@mediaindonesia.com

MASYARAKAT Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendukung upaya pemerintah melalui Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk segera membentuk satuan tugas atau tim gabungan dalam menyelesaikan polemik transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan kehadiran satgas bisa mempercepat penanganan masalah. "Saya kira akan efektif karena itu mengkoordinasikan setiap lembaga yang kemarin masih ego sektoral, masih ada keterbatasan-keterbatasan," ungkap Boyamin kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Menurut dia, pembentukan satgas juga tidak akan memperumit persoalan. "Memperumit? Tidak, justru malah tidak ada satgas itu akan terkatung-katung terus karena masing-masing tetap ada ego sektoral," tandasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU menyebut komite akan membentuk tim gabungan. "Komite akan segera membentuk tim gabungan/satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP (laporan hasil analisis/laporan hasil pemeriksaan PPATK) nilai agregat sebesar Rp349 triliun," kata Mahfud di Gedung PPATK, Jakarta, kemarin.

"Tim akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejaksaan, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Komite akan melakukan *case building* dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Dimulai dengan LHP senilai agregat Rp189 triliun," ungkap Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan temuan transaksi jumbo men-



BENTUK SATGAS ANTITRANSAKSI GELAP: Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri), Kepala Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiawandana (kedua kanan), dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memberikan keterangan pers sesuai rapat Komite Nasional TPPU di Kantor PPATK, Jakarta, kemarin. Rapat itu membahas penanganan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari Rp349 triliun dan akan membentuk satgas untuk mengungkap transaksi gelap tersebut.

curigakan itu sudah dilakukan tindak lanjut oleh Kementerian Keuangan, bahkan telah masuk ke ranah hukum hingga tahap peninjauan kembali. Meski demikian, transaksi itu tetap akan didalami oleh tim gabungan.

"Untuk (LHP) Rp189 triliun yang disampaikan oleh Menko Polhukam di Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dan dijelaskan Menteri Keuangan di Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023, pengungkapan dugaan tindak pidana asal (TPA) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sudah dilakukan langkah hukum terhadap dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga

peninjauan kembali. Namun, komite memutuskan untuk tetap melakukan tindak lanjut termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke proses hukum *case building* oleh Kementerian Keuangan," jelas Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyebut tidak ada perbedaan data terkait transaksi janggal Rp349 triliun. Secara umum, data yang disampaikan dan Menko Sri Mulyani tidaklah berbeda mengingat sumber data yang disampaikan ialah data agregat. "Cara klasifikasi dan penyajian datanya saja yang berbeda. Keseluruhan LHA/LHP yang mencapai 300 surat itu sama dengan total nilai transaksi

agregat senilai lebih dari Rp349 triliun," ungkapnya.

Seperti dijelaskannya, Kemenko Polhukam mencantumkan semua LHA/LHP yang melibatkan pegawai Kemenkeu, termasuk yang dikirimkan ke Kemenkeu ataupun yang dikirimkan ke APIH yang terkait dengan pegawai Kemenkeu, sedangkan Kemenkeu hanya mencantumkan LHA/LHP yang diterima, tetapi tidak mencantumkan LHA/LHP yang dikirimkan ke APIH yang juga terkait dengan pegawai di lingkungannya.

Fokus DPR

Terkait transaksi janggal, anggota Komisi III DPR Arsul

Sani menyatakan yang menjadi fokus Komisi III bukanlah soal perbedaan jumlah data, tetapi lebih ke bagaimana aksi dari komite untuk menyelesaikan pengungkapan uang tersebut.

"Bahwa perbedaan data kami soroti juga, tetapi fokus Komisi III itu lebih ke rencana aksi dari komite yang terdiri atas Kementerian dan lembaga. (Aksi komite) jauh lebih penting dan ditunggu rakyat. Jangan sekadar hanya gegerannya yang ramai-ramai itu. Ioh, antara Komisi III dan pemerintah. Itu kan hanya bunga-bunga, tapi bukan inti persoalan," tutur Arsul, kemarin. (MGN/Ant/X-6)